

# PEMETAAN KEPENTINGAN KEAMANAN MARITIM NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR DAN POSISI STRATEGIS INDONESIA

## THE MAPPING OF EAST ASIAN COUNTRIES' INTERESTS ON MARITIME SECURITY AND INDONESIA'S STRATEGIC POSITION

Erlinda Matondang<sup>1</sup>

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia  
([erlinda.matondang@gmail.com](mailto:erlinda.matondang@gmail.com))

**Abstrak** – Kawasan Asia Timur yang meliputi Asia Tenggara dan Asia Timur Laut mempunyai wilayah perairan yang sangat kaya dan strategis. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama sengketa batas laut dan tindakan saling klaim. Berdasarkan Analisis *Regional Security Complexes* (RSC), kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya negara-negara yang berkonflik, adalah terorisme, perompakan, penyelundupan, dan stabilitas ekonomi. Negara-negara tersebut tidak dapat disatukan pemikiran dan kebijakannya pada tataran politis karena adanya sengketa wilayah yang berpotensi peperangan. Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang tinggi di bidang keamanan maritim. Kepentingan tersebut dapat dicapai dengan berfokus pada kepentingan bersama negara-negara di kawasan, khususnya di bidang perekonomian. Walaupun berada pada tingkatan yang berbeda, hampir semua negara di kawasan mempunyai kepentingan ekonomi yang tinggi di dalam pengamanan maritim. Indonesia dapat mendorong peningkatan kerja sama penanganan keamanan maritim dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

**Kata Kunci** : Asia Timur, Indonesia, keamanan maritim, kepentingan, posisi strategis

**Abstract** – East Asia which consists of Southeast and Northeast has a rich and strategic water area. Actually, there are some problems in this area, especially about border disputes and claimed area. Based on *Regional Security Complexes* (RSC) Analysis, the countries in East Asia, particularly conflicting countries, have the same issues to talk and negotiate, such as piracy, smuggling, and economic stability. Those countries will never be in one voice politically because the disputes happened among them potentially able to cause the war. Indonesia, as one of the countries in Southeast Asia, has high economic and political interests in the maritime security. Those interests can be achieved by focusing on the common interests, especially in the economical life. Although they stay in different level, almost all countries in the region have high economic interests in the maritime security. Indonesia can support the increasing of cooperation on maritime security by keeping economic stability of the region.

**Keywords**: East Asia, Indonesia, interest, maritime security, strategic position

---

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni Universitas Pertahanan Indonesia. Penulis meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

## Pendahuluan

**K**eamanan maritim menjadi *booming* di Indonesia sejak pencetusan visi Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014.<sup>2</sup> Pada dasarnya, isu keamanan maritim bukan hal baru di dunia internasional. Keamanan maritim sudah menjadi perhatian banyak negara di dunia, termasuk di kawasan Asia Timur, khususnya berkaitan dengan perompakan, penyelundupan, perdagangan manusia, dan perusakan lingkungan hidup. Isu keamanan di bidang kemaritiman menjadi semakin krusial dengan adanya terorisme yang memanfaatkan sejumlah perompak.

Asia Timur merupakan wilayah yang meliputi negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur Laut. Negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang tergabung dalam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), kecuali Timor Leste. Negara-negara Asia Timur Laut meliputi Jepang, Cina, Korea Selatan (Korsel), dan Korea Utara. Dalam kerangka kerja sama ASEAN, tiga negara Asia Timur Laut—Jepang, Cina, dan Korsel—turut serta dan membentuk ASEAN+3.

Perairan Asia Timur dan Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang sangat penting untuk jalur perdagangan dunia. Ada ribuan kapal dagang yang melintasi wilayah ini. Apalagi wilayah ini merupakan

rute terpendek untuk menuju Teluk Persia dan Afrika. Perairan Asia Timur dan Laut Cina Selatan juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui, maupun yang tidak. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi perhatian negara-negara di sekitarnya.

Sengketa antarnegara yang terjadi di wilayah ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Untuk sengketa di Laut Cina Selatan, pencapaian terbesar negara-negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai *claimant states* dan Cina ditunjukkan dengan terbentuknya ASEAN *Declaration on the South China Sea* pada 22 Juli 1992. Deklarasi ini yang kemudian berkembang menjadi *Declaration on Conduct of the Parties of South China Sea* (DoC) pada 4 November 2002. Namun, *Guidelines for the Implementation of the DoC* baru disepakati oleh Cina pada tahun 2011.<sup>3</sup> Hingga saat ini ASEAN masih berusaha untuk menyelesaikan pembuatan *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC).

Sengketa di Laut Cina Timur dan Laut Kuning juga cukup pelik. Tiga negara maju di kawasan tersebut, yaitu Cina, Jepang, dan Korsel, saling mengklaim batas wilayah dan pulau. Cina memberikan sikap yang sama terhadap Jepang dan Korsel, yaitu melakukan negosiasi bilateral. Hingga saat ini hasil dari negosiasi ini masih belum signifikan. Namun, kondisi di wilayah perairan tersebut dapat dinyatakan stabil. Artikel ini mengupas kepentingan dari

---

<sup>2</sup> “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, 13 November 2014, diakses pada 31 Januari 2017.

---

<sup>3</sup> Sekretariat ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-21*, (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2015), hlm. 22.

tiga negara tetangga Indonesia yang menjadi *claimant states* dalam sengketa Laut Cina Selatan (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina), serta tiga negara yang terlibat perseteruan di Laut Cina Timur dan Laut Kuning (Cina, Jepang, dan Korsel). Relevansinya kepentingan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *Regional Security Complexes* (RSCT). Dari hasil analisis ini dapat diketahui posisi dari masing-masing negara dalam interaksi pada tingkat regional. Selain itu, hasil analisis ini dapat menunjukkan posisi Indonesia dalam pengamanan wilayah maritim regional. Dengan demikian, Indonesia dapat menentukan sikapnya terhadap kondisi regional dan mengambil peranan yang lebih besar, khususnya dalam posisinya sebagai ketua *Indian Ocean Rim Association* (IORA)<sup>4</sup> pada periode 2015—2017 ini.

### ***Regional Security Complexes* (RSC)**

Keamanan regional berbeda dengan keamanan nasional. Pada keamanan nasional, setiap negara berusaha untuk memenuhi kepentingan keamanannya dengan cara apapun, termasuk bermusuhan dengan negara lain. Sementara itu, keamanan regional menunjukkan bahwa setiap negara saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan untuk mengatasi suatu ancaman

<sup>4</sup> IORA merupakan organisasi yang menyatukan negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 untuk meningkatkan kerja sama sosial-ekonomi. Saat ini organisasi ini beranggotakan 21 negara dan mempunyai tujuh rekan dialog. Lihat, "IORA Background," <http://www.iora.net/about-us/background.aspx>, diakses pada 1 Februari 2017.

keamanan tertentu.<sup>5</sup>

Barry Buzan mendefinisikan *security complex* sebagai sekelompok negara yang perhatian keamanan primernya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Definisi ini yang kemudian dikembangkan oleh Buzan dan rekannya, Ole Waever, pada tahun 1998, menjadi RSC. Definisi RSC dibentuk dengan berfokus pada *state-centric* dan politik militer. Adapun definisi tersebut berbunyi:

*"a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another."*<sup>6</sup>

Definisi ini lebih rumit dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Buzan pada tahun 1983. Dalam definisi ini, RSC tidak hanya membutuhkan analisis pada tataran regional, tetapi juga setiap unit negara di dalamnya. Analisis pada unit negara dilakukan dalam sekuritisasi dan/atau desekuritisasi.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat diketahui cara setiap unit mengambil peranannya dalam berinteraksi dengan unit atau negara lain.

<sup>5</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *Regions and Power: The Structure of International Security*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 43.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>7</sup> Sekuritisasi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada proses penetapan suatu hal menjadi isu keamanan. Sementara itu, desekuritisasi adalah kebalikan dari sekuritisasi. Kedua konsep ini diangkat oleh Ole Waever yang dikembangkan oleh Barry Buzan. Kedua konsep ini sering digunakan untuk menelaah isu-isu keamanan, baik di tingkat individu, negara, maupun internasional. Lihat, Barry Buzan, *People, States and Fear: the National Security Problem in International Relations*, (Great Britain: Wheatsheaf Book Ltd, 1983).

RSC mempunyai empat variabel yang digunakan dalam empat tingkat analisis. Keempat variabel itu, antara lain perbatasan regional yang membedakan setiap institusi regional, struktur anarkis, polaritas, dan konstruksi sosial yang meliputi pola pertemanan dan/atau permusuhan.<sup>8</sup> Keempat tingkat analisis ini saling berkaitan. Berikut ini adalah keempat tingkat analisis tersebut.

1. Kondisi domestik di setiap negara. Tingkat analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya suatu negara melalui stabilitas domestik.
2. Hubungan antarnegara. Tingkat analisis ini yang secara umum dikenal dengan interaksi pada tataran regional.
3. Interaksi interregional. Tingkat analisis ini menjadi sangat penting jika terdapat perubahan utama yang sedang berlangsung.
4. Peranan *global power* di kawasan. Tingkat analisis ini menjelaskan hubungan yang saling memengaruhi antara struktur keamanan global dan regional.

Analisis ini dilakukan terhadap tiga negara tetangga Indonesia yang menjadi *claimant states* dalam konflik Laut Cina Selatan dan tiga negara Asia Timur yang juga saling bersengketa, yaitu Cina, Jepang, dan Korsel di Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Pemilihan enam negara ini berdasarkan keterlibatan mereka di

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 53.

dalam konflik. Sementara itu, Indonesia juga turut dikaji karena posisinya yang selalu bertindak sebagai mediator dan adanya kepentingan dan tugas untuk menjaga stabilitas perekonomian negara-negara anggota IORA.

## **Kepentingan Keamanan Maritim Negara-negara Asia Timur**

### *Cina*

Cina mempunyai 6.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 32.000 km (wilayah daratan utama sepanjang 18.000 km, sedangkan sisanya merupakan garis pantai dari pulau-pulaunya).<sup>9</sup> Wilayah perairan ini kaya sumber daya alam dan penting untuk *Sea Lines of Communication* (SLoC).<sup>10</sup> Ada empat kepentingan maritim Cina, yaitu unifikasi dengan Taiwan, kepentingan teritorial, pengamanan kekayaan laut, dan perlindungan perdagangan dan infrastruktur maritim.<sup>11</sup> Tidak ada pernyataan pemerintah Cina tentang kepentingan inti yang ingin dicapainya dalam bidang maritim walaupun pernyataan resmi yang disampaikan pada tahun 2003 menunjukkan bahwa perhatian utama pemerintah Cina adalah unifikasi Taiwan.<sup>12</sup> Pada tahun 2009, pemerintah Cina mempublikasikan kepentingan

<sup>9</sup> J.Y. Liu, "Status of Marine Biodiversity of the China Seas," dalam *PloS One*, Vol. 8, No.1, 2013, yang mengutip Wang Y, Su J, Liu R, (eds), *Oceanography of China*, (Beijing: Science Press, 2012).

<sup>10</sup> Gaoyue Fan, "Maritime Interests: China—US Cooperation and Conflicts", dalam *Issues and insight*, Vol. 11, No. 10, 2011, hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1-3.

<sup>12</sup> Caitlin Campbell, et al., "China's 'Core Interests' and the East China Sea" dalam *U.S.-China Economic and Security Review Commission*, 10 Mei 2013, hlm. 2.



utama Cina dalam *U.S.-China Strategic and Economic Dialogue*, yaitu penegakan sistem dasar keamanan nasional, integritas kedaulatan dan kewilayahan, serta perkembangan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan.<sup>13</sup>

Unifikasi dengan Taiwan menjadi hal yang sangat penting dalam geopolitik Cina. Unifikasi ini memberikan empat keuntungan kepada Cina. Pertama, Cina dapat mengamankan SLoC yang berada di Selat Taiwan dan meningkatkan peranan dalam perkembangan ekonomi global dan regional. Kedua, Cina mendapatkan sumber daya maritim yang lebih besar untuk memperkuat *sea power*. Ketiga, Cina dapat memperbesar strategi pertahanan untuk melindungi kedaulatan negaranya. Keempat, Cina dapat meningkatkan kekuatan nasionalnya. Keuntungan-keuntungan ini merupakan bagian dari kepentingan utama Cina dalam permasalahan maritim, baik yang terjadi dengan negara-negara anggota ASEAN maupun Korea Selatan dan Jepang.<sup>14</sup>

Cina terlibat dalam sengketa wilayah perairan dengan delapan negara di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan Laut Kuning. Cina menggunakan pendekatan sejarah dalam mengklaim kedaulatannya di wilayah sengketa tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, pemerintah Cina melakukan negosiasi, kerja sama, dan konsultasi

dengan negara-negara terkait.<sup>15</sup> Kawasan bawah Laut Cina Selatan yang diklaim Cina sebagai bagian dari kedaulatannya mempunyai kekayaan yang besar. Pada tahun 2013, *U.S. Energy Information Administration* memperkirakan ada 11 juta barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas, sedangkan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) memperkirakan ada lebih dari 123 juta barel minyak dan 500 triliun kaki kubik gas.<sup>16</sup> Dengan potensi ini, Cina menargetkan untuk mencapai 10,8% pertumbuhan ekonomi dari sektor maritim pada tahun 2020. Persentase ini diharapkan meningkat sekitar 10% setelah 2030.<sup>17</sup>

Perairan atau laut merupakan jalur utama perdagangan, ekspor-impor Cina. Pada tahun 2009, nilai ekspor dan impor Cina mencapai \$2,12 triliun.<sup>18</sup> Pada Desember 2016, nilai ekspor dan impor Cina mengalami penurunan, sehingga hanya mencapai \$509,96 juta.<sup>19</sup> Dari nilai ini, lebih dari 90% ekspor dan impor bergantung pada transportasi maritim. Oleh karena itu, Cina melakukan pembangunan berskala besar untuk meningkatkan infrastruktur maritim. Salah satunya adalah dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan dalam jumlah massif yang delapan di antaranya termasuk sepuluh pelabuhan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>16</sup> Lindsay Dodgson, 2 Mei 2016, "Resources and Tension in the South China Sea" dalam <http://www.offshore-technology.com/features/feature-resources-and-tensions-in-the-south-china-sea-4707224/>, diakses pada 7 Februari 2017.

<sup>17</sup> Gaoyue, *op.cit.*, hlm 2-3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Rida Husna, 13 Januari 2017, "China Trade Surplus Narrow to 8-Month Low in December," dalam <http://www.tradingeconomics.com/china/balance-of-trade>, diakses pada 7 Februari 2017.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 3. Hal yang sama juga dikutip oleh Linda Jakobson, "China's Unpredictable Maritime Security Actors", dalam *Lowy Institute for International Policy Report*, Desember 2014, hlm. 6.

<sup>14</sup> Gaoyue, *op.cit.*, hlm. 1 - 2.

perairan dalam terbesar di dunia.<sup>20</sup>

Selain keempat kepentingan tersebut, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa tujuan Cina adalah menjadikannya sebagai “true maritime power” dan merealisasikan “21<sup>st</sup> century Maritime Silk Road.”<sup>21</sup> Kepentingan maritim Cina yang sangat besar tidak dapat dicapai tanpa hak dan kedaulatan maritim. Bahkan tanpa hak maritim, tidak akan ada revolusi industri di Cina.<sup>22</sup>

### Korea Selatan

Kepentingan maritim Korea Selatan (Korsel) ditentukan oleh tiga faktor rasional, yaitu situasi geopolitik Korea, luas wilayah yang sempit dan sumber daya alam yang terbatas, dan agenda sosial-ekonomi. Kebutuhan pangan untuk jumlah populasinya yang terus mengalami peningkatan merupakan alasan utama pemerintah Korsel, selain perseteruan yang terjadi di Semenanjung Korea. Pada tahun 1991, 43,27 juta orang menduduki Korsel yang mempunyai wilayah seluas 99.299 km<sup>2</sup>.<sup>23</sup> Jumlah ini terus meningkat dan saat ini mencapai 50.624.867 orang dengan kepadatan populasi sebesar 522 orang/km<sup>2</sup>.<sup>24</sup> Kepadatan populasi yang

tinggi dan adanya delimitasi batas laut seluas 447.000 km<sup>2</sup>, wilayah perairan lebih luas dibandingkan lahan yang dapat ditanami, mendorong pemerintah Korsel untuk memberikan perhatian lebih pada keamanan maritim. Apalagi secara ekonomi, perdagangan Korsel bergantung pada perkapalan, termasuk ekspor-impor untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya.<sup>25</sup>

SLoC Asia Timur yang menjadi jalur perdagangan Korsel melintasi wilayah maritimnya. Sebagai negara importir *Liquid Natural Gas* (LNG) terbesar kedua di dunia dan juga negara importir petroleum terbesar kelima di dunia, Korsel menggunakan jalur perdagangan laut karena tidak ada pipa saluran internasional. Perhatian pemerintah Korsel terhadap SLoC ini semakin meningkat karena banyaknya isu keamanan maritim yang bermunculan, seperti perompakan, penyelundupan, terorisme, dan pengembangan senjata. Apalagi jalur ini juga melintasi wilayah Korea Utara yang diwaspadai akan menggunakannya untuk pengiriman nuklir dan bahan peluru.<sup>26</sup>

Kepentingan maritim Korsel juga muncul untuk memperkuat strategi menghadapi Korea Utara. Sengketa wilayah juga terjadi antara dua negara saudara tersebut. Sengketa wilayah

<sup>20</sup> Gaoyue, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>21</sup> Sukjoon Yoon, “Korea-China Maritime Boundary Talks: Implications for South China Sea,” *RSIS Commentary*, Nomor 089—13 April 2015, hlm. 2.

<sup>22</sup> Zhang Shiping of the Academy of Military Science, dikutip oleh Isaac B. Kardon, “China’s Maritime Rights and Interests: Organizing to Become a Maritime Power” disampaikan dalam *The China as a “Maritime Power” Conference*, Arlington pada 28—29 Juli 2015, hlm. 8.

<sup>23</sup> Seoung-Yong Hong, “Marine Policy in the Republic of Korea” dalam *Marine Policy*, Vol. 9, No.2, 1995, hlm. 98.

<sup>24</sup> Berdasarkan data perkiraan Perserikatan

Bangsa-bangsa pada tanggal 6 Februari 2017, <http://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/>, diakses pada 7 Februari 2017.

<sup>25</sup> Seoung-Yong Hong, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>26</sup> Louie Dane C. Merced, “The Potentials and Limits of Philippines—South Korea Maritime Defense Cooperation,” dalam *FSI INSIGHT*, Vol. 1, No. 4, September 2014, hlm. 2.

di antara keduanya berkaitan dengan penentuan Garis Batas Laut Bagian Utara. Selain itu, sengketa wilayah dengan Jepang terhadap pulau yang disebut *Dokdo* oleh Korsel dan *Takeshima* oleh Jepang. Sengketa batas wilayah perairan juga terjadi dengan Cina dalam penentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk sengketa pulau yang disebut *leodo* oleh Korsel *Suyan* oleh Cina.<sup>27</sup>

### *Jepang*

Tidak jauh berbeda dengan Korsel, Jepang juga memerlukan sumber daya maritim untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan sebagai jalur ekspor-impor. Apalagi Jepang merupakan negara dengan wilayah yang miskin sumber daya alam dan memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan dengan negara lain.<sup>28</sup> Untuk itu, Jepang membutuhkan akses ke komoditi regional dan bahan pangan. Kepentingan Jepang di Asia Tenggara berkaitan dengan jalur perdagangan bebas di wilayah strategis, seperti Singapura, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Cina Selatan.<sup>29</sup> Kepentingan Jepang di Asia Tenggara meningkat dengan adanya sengketa di Laut Cina Selatan yang semakin meningkat pada tahun 1990-an dan 2000-an. Apalagi dengan adanya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Euan Graham, "Divining the Fluid Element: From Cooperation to Conflict in Japan-China Maritime Relations" dalam *Security Challenges*, Vol. 11, No.1, 2015, hlm. 53.

<sup>29</sup> Ian Storey, "Japan's Maritime Security Interests in Southeast Asia and the South China Sea Dispute", *Political Science*, Vol. 65, No. 2, 2013, hlm. 138—139.

kebijakan "Charm Offensive" yang dilakukan Cina pada tahun 2000—2007 dan kemunculan isu-isu perompakan dan terorisme di wilayah perairan Asia Tenggara.<sup>30</sup>

Jepang juga terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Timur, yaitu di Pulau Senkaku/Diaoyu. Sebagaimana kesepakatan Jepang dan Amerika Serikat (AS) di San Fransisco pada tanggal 8 September 1951, negara Paman Sam tersebut mempunyai kewajiban untuk melindungi semua pulau yang berada di bawah pemerintahan Jepang. Namun, pada kenyataannya, pemerintah AS cenderung tidak mengambil sikap terhadap sengketa kedaulatan antara Jepang dan Cina tersebut.<sup>31</sup>

### *Indonesia*

Indonesia bukan merupakan aktor baru dalam pengamanan sektor maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur transportasi internasional. Wilayah perairan Indonesia juga berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang menjadi tempat pertemuan empat SLoC. Wilayah Indonesia semakin strategis dengan adanya enam *choke points* yang mengitarinya, yaitu Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, dan Selat Wetar yang digunakan untuk navigasi internasional.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>31</sup> Euan Graham, *op.cit.*, hlm. 62.

Wilayah perairan Indonesia juga sangat kaya dengan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Bahkan, sepertiga dari gas dunia berada di seputar Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan yang menjadi rute laut terpendek untuk mencapai Teluk Persia dan Afrika.<sup>32</sup>

Pemerintahan Joko Widodo, yang dimulainya sejak tahun 2014 mengeluarkan Visi Poros Maritim Dunia. Visi ini mengusung lima kebijakan, yang meliputi diplomasi maritim untuk menyelesaikan sengketa batas laut, pengamanan kedaulatan dan keamanan maritim, pengamanan sumber daya alam, intensitas diplomasi pertahanan, dan pengurangan pertikaian maritim antarnegara melalui resolusi sengketa wilayah regional.<sup>33</sup> Untuk mendukung pencapaian visi tersebut dan meningkatkan kehadiran diplomatik Indonesia dalam penyelesaian sengketa maritim, pemerintah mengambil beberapa tindakan. Adapun tindakan-tindakan tersebut, yaitu (i) konsolidasi pemimpin negara-negara anggota ASEAN; (ii) peningkatan sentralitas dan kerja sama regional; (iii) pembangunan arsitektur keamanan regional yang kohesif untuk mencegah kemunculan kekuatan yang lebih besar; (iv) pendalaman dan pengembangan kerja sama bilateral strategis; (v) pengelolaan dampak integrasi ekonomi regional dan

perdagangan bebas; dan (vi) promosi kerja sama maritim yang komprehensif dalam kerangka kerja IORA.<sup>34</sup>

Pada tahun 2015—2017, Indonesia menjadi ketua IORA. Meskipun IORA merupakan organisasi yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan perdagangan, keamanan maritim menjadi salah satu prioritas kerja sama sebagaimana yang ditetapkan dalam Pertemuan COM IORA 2012.<sup>35</sup> Posisi Indonesia sebagai ketua IORA berdampak pada interaksi antarnegara dalam keamanan maritim Asia Timur. Walaupun dari tujuh negara yang diangkat pada tulisannya, hanya Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota IORA. Kerja sama ini sangat penting untuk keamanan maritim negar-negara Asia Timur. Apalagi dengan bergabungnya Jepang dan Cina sebagai mitra dialog IORA.

Untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim, Presiden Joko Widodo menyetujui kerja sama dengan pemerintahan Cina dalam lima bidang prioritas pada 25 Maret 2015. Adapun kelima bidang prioritas tersebut, antara lain: (1) politik, pertahanan, dan keamanan; (2) perdagangan, investasi, dan perkembangan ekonomi; (3) maritim, aeronotika, ilmu pengetahuan, dan

<sup>32</sup> Masyithoh Annisa Ramadhani, "An Indonesian Perspective toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest while Maintaining Neutrality in the South China Sea Possible?", dalam *European Scientific Journal*, November 2015, hlm. 389—390.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 392.

<sup>34</sup> Iis Gindarsah dan Adhi Priamarizki, "Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns", dalam *RSIS Policy Report*, hlm. 3.

<sup>35</sup> Firdaus Dahlan, "Indian Ocean Rim Association (IORA) Peran Indonesia Memperkuat Kerja Sama di Kawasan Samudera Hindia," dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/teras-diplomasi/1833-indian-ocean-rim-association-ioraperan-indonesia-memperkuat-kerjasama-di-kawasan-samudera-india.html>, 26 Maret 2015, diakses pada 7 Februari 2017.



teknologi; (4) kebudayaan dan sosial; dan (5) hubungan regional dan internasional. Selain itu, dalam kerangka *China-Indonesia Maritime Cooperation Fund* (MCF), Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sudah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang keamanan navigasi, keamanan maritim, *search and rescue* (SAR), penelitian keilmuan maritim, dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>36</sup>

### Filipina

Selain Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara. Filipina mempunyai 7.107 pulau, yang seribu di antaranya tidak berpenghuni. Filipina juga menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Garis pantai Filipina sepanjang 10.850 mil atau dua kali lebih panjang dari pada wilayah kontinental AS.<sup>37</sup>

Berbeda dengan Indonesia yang tidak terlibat atau berada posisi netral dalam sengketa Laut Cina Selatan, Filipina berseteru dengan Cina terkait klaim atas ZEE-nya. Namun, keputusan arbitrase internasional yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016 menyatakan bahwa kedaulatan ZEE berada di tangan Filipina.

Pada dasarnya, Filipina mempunyai kepentingan yang hampir sama dengan Indonesia sebagai negara kepulauan.

<sup>36</sup> Masyithoh Annisa Ramadhani, *op.cit.*, hlm. 391.

<sup>37</sup> Renato Cruz de Castro, "International Dimensions of National (In) Security Concepts, Challenges and Ways Forward," disampaikan dalam 9<sup>th</sup> Berlin Conference on Asian Security (BCAS) yang dilaksanakan di Berlin pada tanggal 14—16 Juni 2015, hlm. 4.

Namun, secara lebih jelas, kepentingan Filipina dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahnya dalam upaya pengamanan wilayah maritim. Adapun tujuan tersebut, antara lain: (1) mempromosikan dan meningkatkan keamanan maritim sebagai komponen utama keamanan nasional; (2) menyediakan lingkungan sosial-politik dan administratif yang stabil dan aman yang dapat mendorong pertumbuhan industri maritim; (3) melindungi dan mempertahankan integritas sumber daya maritim; dan (4) memperkuat postur keamanan maritim dengan berpegang pada Hukum Dasar dan memperluas perencanaan pertahanan eksternal.<sup>38</sup> Kepentingan keamanan maritim Filipina semakin besar dengan adanya keputusan Arbitrase Internasional terhadap kepemilikan Laut Filipina Barat. Arbitrase internasional menyimpulkan bahwa Cina tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengklaim wilayah tersebut.<sup>39</sup>

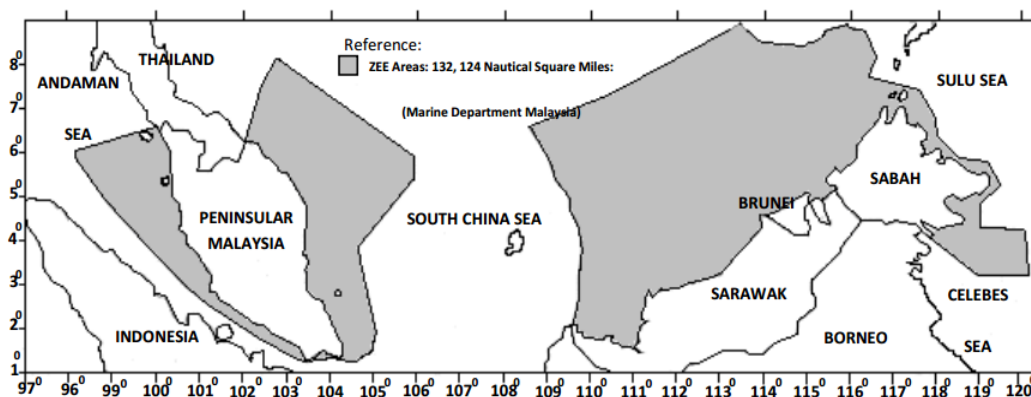
### Brunei Darussalam

Keamanan dan kesejahteraan Brunei Darussalam berpegang pada tiga pilar kebijakan nasional, yaitu kohesivitas dan stabilitas negara; stabilitas lingkungan regional dalam keanggotaan ASEAN;

<sup>38</sup> Republika Ng Pilipinas, *National Security Policy 2011—2016: Security the Gains of Democracy*, (Manila: Republika Ng Pilipinas, 2011), hlm. 30.

<sup>39</sup> Matikas Santos, 12 Juli 2016, "Philippines Wins Arbitration Case vs. China over South China Sea," dalam <https://globalnation.inquirer.net/140358/philippines-arbitration-decision-maritime-dispute-south-china-sea-arbitral-tribunal-unclos-itlos>, diakses pada 7 Februari 2017.

Gambar 1. Peta ZEE Malaysia



Sumber: Diadaptasi dari Peta ZEE Malaysia tahun 1979 (Map Baru, No. 26, Tambahan No.1, No.5745, 21 Desember 1979), Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia.

serta pengelolaan kapabilitas pertahanan untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah dan kepentingan, serta menjaga kebebasan dan kemerdekaan.<sup>40</sup> Brunei Darussalam merupakan salah satu *claimant states* dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, pemerintahnya membentuk beberapa kebijakan dan peranan operasional.

Adapun peranan operasional yang diambil oleh pemerintah Brunei Darussalam, yaitu pengawasan dan tanggapan maritim, ancaman di daratan, dan serangan udara; pengawasan *maritime focal areas*; serta pengamanan aset nasional dan infrastruktur tugas nasional.<sup>41</sup> Peranan-peranan ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama termasuk perluasan ruang patroli dari 200nm untuk menunjukkan kedaulatan, mengatur aktivitas perikanan, dan menyediakan peringatan dini untuk kemungkinan ancaman keamanan. Elemen kedua

berupa perluasan wilayah penjagaan hingga 100 nm dari pantai untuk SLoC, melindungi *platform* minyak dan gas, serta mendeteksi dan menanggapi gerakan transnasional yang signifikan.<sup>42</sup>

### Malaysia

Malaysia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik dalam bidang maritim. Pada tataran politik, Malaysia merupakan salah satu *claimant states* dalam sengketa Laut Cina Selatan. Dalam sikapnya sebagai negara pengklaim, Malaysia mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi Malaysia berkaitan erat dengan wilayah ZEE. Hal ini terjadi karena hasil eksplorasi dan eksploitasi wilayah ZEE, seperti minyak dan gas, yang bernilai jual tinggi.<sup>43</sup> Bahkan, pendapatan yang diperoleh Malaysia dari industri minyak dan gas mencapai 40% dari total pendapatan nasional.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>43</sup> Mohamad Rosni Othman, "A New Management Structure for Malaysian Economic Exclusive Zone" dalam *The International Journal of Social Sciences*, Vol. 4, No.1, 30 November 2012, hlm. 47.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>40</sup> Ministry of Defence of Brunei Darussalam, *Brunei Darussalam Defence White Paper 2004*, (Bandar Seri Begawan: Ministry of Defence of Brunei Darussalam, 2004), hlm. 18.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 20.

ZEE Malaysia mengandung kekayaan perikanan dan sumber daya hidrokarbon yang melimpah dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Wilayah ini juga menjadi kawasan strategis untuk Malaysia. Strategi maritim dan SLoC Malaysia dibangun dengan ruang lingkup wilayah perairan dan udara yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, Selat Malaka, serta Selat Singapura.<sup>45</sup> Peta ZEE Malaysia dapat dilihat pada Gambar 1.

### Forum Kerja sama ASEAN di Bidang Keamanan Maritim

Negara-negara anggota ASEAN sepakat bahwa keamanan maritim merupakan permasalahan lintas negara yang harus diselesaikan bersama. Hal ini ditekankan dalam *Declaration on ASEAN Concord II* 2003. Pembahasan isu maritim yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dilaksanakan dalam pelbagai mekanisme, antara lain: ASEAN Regional Forum (ARF); ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM); ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM-Plus); ASEAN Maritime Forum (AMF); dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF). Selain itu, masih ada sekitar 13 mekanisme lainnya.<sup>46</sup>

Kerja sama ASEAN di bidang keamanan maritim difokuskan pada hal-hal yang bersifat praktis, seperti *Table Top Exercise* (TTX), *Field Training Exercise* (FTX), *workshops* dan *training*, *Passing*

*Exercises* (PASSEX), penyelenggaraan *online sources*, dan pembentukan *Security Community Information-Sharing Portal* (AMSCIP). Sementara itu, kerja sama pada tataran dialog diprakarsai oleh Indonesia melalui pembentukan AMF. Selain itu, dalam kerangka ARF, pembahasan isu maritim dieksplorasi dan dikembangkan dalam *Inter-Sessional Meeting* (ISM) yang diketuai oleh satu negara anggota ASEAN dan satu negara non-anggota ASEAN. Semua kerja sama ini dibangun untuk meningkatkan kepercayaan antarnegara di tengah perseteruan wilayah perairan.<sup>47</sup>

### Analisis RSC

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa setiap negara mempunyai kondisi domestik yang berbeda-beda. Interaksi dengan negara lain juga dilakukan dengan cara yang berbeda. Namun, dalam kerangka kerja sama regional, semuanya mempunyai kebijakan yang sama. Walaupun kebijakan ini dibentuk dalam proses dan waktu yang sangat panjang, semua negara meratifikasi kerja sama tersebut. Sementara itu, untuk hubungan dengan *global power*, ketujuh negara ini mempunyai latar belakang dan hubungan yang berbeda-beda. Kesenjangan dari semua negara terdapat pada penyelesaian isu maritim bersama, seperti perompakan, terorisme, dan penyelundupan.

Pada interaksi antarnegara di kawasan, Cina, Korsel, dan Jepang tidak mempunyai hubungan yang baik karena faktor historis. Bahkan, masyarakatnya

<sup>45</sup> Ministry of Defence of Malaysia, *Malaysia's National Defence Policy*, (Kuala Lumpur: Ministry of Defence of Malaysia, n.d.), hlm. 3.

<sup>46</sup> Sekretariat ASEAN, op.cit., hlm. 34—35.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 35—36.

**Tabel 1.** Level Analisis RSC dalam Isu Keamanan Maritim di Asia Timur

<b>Nama Negara</b>	<b>Kondisi Domestik</b>	<b>Hubungan Antarnegara</b>	<b>Interaksi Interregional</b>	<b>Peranan Global Power</b>	<b>Isu Keamanan Bersama</b>
<b>Cina</b>	Unifikasi Taiwan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengketa Pulau Senkaku/Diaoyu dengan Jepang.</li> <li>- Sengketa Pulau Ieodo/Suyan dengan Korsel.</li> <li>- Klaim di Laut Cina Selatan.</li> </ul>	Kerja sama dalam kerangka ASEAN+3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-aliansi dengan AS.</li> <li>- Pemegang hak veto Perserikatan Bangsa-bangsa.</li> </ul>	Perompakan, terorisme, penyelundupan.
<b>Korea Selatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas wilayah yang kecil.</li> <li>- Kepadatan penduduk yang tinggi.</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan rakyat melalui sumber daya kelautan.</li> <li>- Jalur laut untuk perdagangan dan pengiriman petroleum dan LNG karena tidak ada pipa saluran internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengketa Pulau Ieodo/Suyan dengan Cina.</li> <li>- Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima dengan Jepang.</li> <li>- Penyelesaian garis batas laut di wilayah utara dengan Korea Utara yang belum selesai.</li> <li>- Konflik Semenanjung Korea.</li> </ul>	Kerja sama dalam kerangka ASEAN+3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aliansi dengan AS.</li> </ul>	Perompakan, terorisme, penyelundupan.
<b>Jepang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah yang miskin SDA.</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan rakyatnya bergantung pada impor melalui jalur perdagangan laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima dengan Korsel</li> <li>- Sengketa Pulau Senkaku/Diaoyu dengan Cina</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aliansi dengan AS.</li> </ul>	Perompakan, terorisme, penyelundupan.
<b>Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letak geografi yang strategis.</li> <li>- Kekayaan SDA yang melimpah.</li> <li>- Wilayah perairannya menjadi jalur perdagangan laut dunia.</li> <li>- Visi Poros Maritim Dunia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berorientasi pada stabilitas regional.</li> <li>- Pernah terlibat konflik dengan Malaysia yang menyebabkan sentimen hingga saat ini.</li> <li>- Sengketa wilayah Ambalat dengan Malaysia.</li> </ul>	Upaya penyelesaian konflik dalam ASEAN dan ASEAN+3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-aliansi AS.</li> </ul>	Perompakan, terorisme, penyelundupan.



		- Kerja sama yang baik dengan Filipina, termasuk menjadi mediator untuk mengatasi separatisme di Filipina Selatan.			
<b>Filipina</b>	- Gerakan separatisme di wilayah bagian selatan yang berkembang menjadi perompakan dan terorisme.	- Sengketa ZEE dengan Cina. - Kerja sama yang baik dengan Indonesia. - Sentimen terhadap Malaysia karena permasalahan kepemilikan Sabah.	Upaya penyelesaian konflik dalam ASEAN dan ASEAN+3.	- Aliansi dengan AS. - Arbitrase Internasional	Perompakan, terorisme, penyelundupan.
<b>Brunei Darussalam</b>	- Pemenuhan kebutuhan melalui kekayaan laut. - Wilayah daratan yang dikelilingi oleh Malaysia.	- Sengketa di Laut Cina Selatan.	Upaya penyelesaian konflik dalam ASEAN dan ASEAN+3.	Persemakmuran Inggris.	Perompakan, terorisme, penyelundupan.
<b>Malaysia</b>	- Pendapatan negara utama berasal dari sektor maritim. - Wilayah kedaulatannya terpisah (Semenanjung Malaysia dengan Sabah & Sarawak)	- Sengketa di Laut Cina Selatan. - Sentimen sosial terhadap Indonesia.	Upaya penyelesaian konflik dalam ASEAN dan ASEAN+3.	Persemakmuran Inggris	Perompakan, terorisme, penyelundupan.

Sumber: Diolah oleh penulis.

juga mempunyai sentimen sosial. Tidak ada rasa saling percaya dalam interaksi antarnegara. Pada dasarnya, hal yang sama juga terjadi pada negara-negara di Asia Tenggara. Namun, kepentingan bersama yang dituangkan dalam kerangka kerja ASEAN menjadi pemersatu negara-negara tersebut. Beberapa kali

konflik antaranggota ASEAN sempat terjadi, tetapi diredam oleh kepentingan bersama. Sebagai contohnya adalah permasalahan kepemilikan Tari Pendet yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dan kepemilikan Angkor Wat antara Kamboja dan Thailand. Apalagi ada sentimen politik akibat sejarah, seperti

yang terjadi antara Malaysia dan Filipina atas kepemilikan Sabah.

Jika dilihat dari Tabel 1, permasalahan utama dalam interaksi antarnegara adalah sengketa wilayah, terutama wilayah perairan. Cina dengan klaimnya yang dikenal dengan nama *nine dashed-line*<sup>48</sup> menjadi musuh hampir sebagian besar negara di Asia Timur. Untuk menghadapi klaim ini, ASEAN mempunyai kebijakan yang sama, yaitu menyelesaikan sengketa secara multilateral walaupun Cina lebih memilih negosiasi bilateral. Sementara itu, Jepang dan Korsel tidak bertindak seperti ASEAN. Dua negara ini tidak menempuh jalur multilateral.

Ada tiga jenis hubungan dalam level peranan *global power*. Pertama, AS sebagai negara adikuasa yang beraliansi dengan beberapa negara Asia Timur. Kedua, negara yang tidak memilih beraliansi dengan negara lain. Ketiga, negara persemakmuran Inggris yang mempunyai kerja sama *Five Power Defence Arrangement* (FPDA), kecuali Brunei Darussalam.

Negara-negara yang beraliansi dengan AS merasa tidak mendapatkan keuntungan atau bantuan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi cukup

<sup>48</sup> Pada tahun 1947, Cina memunculkan peta *11-dashed line* untuk mengawasi pulau-pulau yang diokupasi oleh Jepang selama Perang Dunia II. Lalu dua titik (*dashes*) dihapuskan pada tahun 1950, yaitu yang melewati Teluk Tonkin. Penghapusan ini dilakukan sebagai bentuk persekutuan Cina dan Vietnam Utara, "What's China's 'nine-dash line' and why has it created so much tension in the South China Sea?", dalam <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1988596/whats-chinas-nine-dash-line-and-why-has-it-created-so>, 17 Oktober 2016, diakses pada 7 Februari 2017.

efektif untuk mengamankan kepentingan maritimnya. Hal ini diakui oleh Jepang dan Filipina. Walaupun armada AS berada di perairan mereka, peranannya dalam menyelesaikan sengketa wilayah perairan nyaris tidak ada. Peranan AS hanya terlihat untuk mengatasi isu bersama, seperti perompakan dan terorisme.

Cina yang menjadi musuh bersama *claimant states* dalam isu Laut Cina Selatan justru menjalin kerja sama ekonomi dengan AS. Nilai perdagangan AS-Cina sangat besar. Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang netral dan tidak akan pernah menjalin aliansi dengan negara lain juga mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan AS dan Cina. Selain itu, kerja sama ekonomi Indonesia dengan Jepang dan Korsel juga berlangsung sangat baik. Hingga saat ini, Jepang merupakan investor terbesar kedua Indonesia, begitu pula dengan Korsel yang masuk ke dalam jajaran sepuluh besar negara investor terbesar di Indonesia. Konflik di Asia Timur nyaris tidak berdampak ke Indonesia, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas regional.

Ada dua negara persemakmuran Inggris yang disoroti dalam artikel ini, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia. Ada perbedaan kerja sama keamanan yang dijalin oleh kedua negara ini. Malaysia tergabung dalam FPDA, sedangkan Brunei Darussalam tidak. Namun, ancaman yang dihadapi oleh Malaysia cenderung lebih besar dibandingkan dengan Brunei Darussalam.

Dalam penyelesaian isu perompakan, terorisme, dan penyelundupan, Brunei Darussalam dapat dengan mudah bekerja sama dengan Filipina dan Indonesia, sedangkan Malaysia memerlukan proses yang lebih sulit. Hal ini disebabkan oleh sentimen sosial dan politik yang terjadi dalam hubungan Malaysia dengan Indonesia dan Filipina. Apalagi Filipina menerapkan *Visiting Forces Agreement* (VFA) dan/atau *Status of Visiting Forces Agreement* (SOVFA), sehingga tidak semua negara dapat memasuki wilayah perairannya walaupun untuk menyelamatkan warga negaranya atau memberantas terorisme. Hal ini yang dihadapi oleh pemerintah

Indonesia dalam kasus penculikan warga negaranya oleh Kelompok Abu Sayyaf yang berada di Perairan Sulu. Sementara itu, kerja sama FPDA yang dimiliki Malaysia tidak akan berlaku untuk menyelesaikan permasalahan perompakan karena aktor yang dihadapi bukan merupakan negara.

Pengaruh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga di bawah naungannya tidak mempunyai peranan yang cukup besar, kecuali sengketa di Asia Timur dibawa ke dalam forum PBB atau lembaga internasional lainnya. Sebagaimana upaya Filipina mengangkat sengketa ke arbitrase internasional untuk mendapatkan akses ke ZEE yang diklaim Cina sebagai wilayah kedaulatannya. Jika

**Tabel 2.** Analisis Variabel RSC dalam Interaksi Kepentingan Maritim di Asia Timur

Nama Negara	Perbatasan Regional	Struktur Anarkis	Polaritas	Konstruksi Sosial
Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada organisasi regional (hanya ada dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan satu isu tertentu, seperti <i>Six Party Talks</i> untuk menyelesaikan ancaman dari Korea Utara)</li> <li>- Tidak mempunyai komitmen regionalitas.</li> </ul>	ASEAN+3	-	Teman : Tidak teridentifikasi Musuh : <i>Claimant States</i> lainnya dan AS
Korsel		ASEAN+3	AS	Teman : AS Musuh : Cina, Jepang, Korea Utara
Jepang		ASEAN+3	AS	Teman : AS Musuh : Cina, Korsel, Korea Utara
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergabung dalam organisasi regional (ASEAN)</li> <li>- Negara-negara anggota ASEAN mempunyai sentimen satu sama lain, tetapi tetap berkomitmen untuk menjalankan kerja sama regional di pelbagai bidang</li> </ul>	ASEAN ASEAN+3	ASEAN	Teman : Tidak teridentifikasi Musuh : Tidak teridentifikasi
Filipina		ASEAN	AS ASEAN	Teman : AS Musuh : Cina
Brunei Darussalam		ASEAN+3	Inggris ASEAN	Teman : Inggris, ASEAN Musuh : Cina
Malaysia		ASEAN	Inggris ASEAN	Teman : Inggris, ASEAN, FPDA Musuh : Cina

Sumber: Diolah oleh penulis

ditinjau berdasarkan empat variabel dalam Analisis RSC, ancaman keamanan wilayah perairan di Asia Timur menjadi semakin jelas. Selain itu, interaksi antarnegara yang terjadi saat ini juga dapat dipahami dengan lebih mudah. Perhatikan Tabel 2.

Dalam Tabel 2 dapat dilihat perbedaan dari negara-negara dari Asia Tenggara dan Asia Timur Laut bahwa hampir setiap negara mempunyai teman dan musuh. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Cina dan Indonesia. Teman dari Cina tidak dapat ditebak, tetapi musuhnya dapat dilihat secara jelas dari interaksinya di kawasan, khususnya dalam sengketa perbatasan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Cina selalu menjadi sekutu untuk hal-hal yang menyangkut perekonomian negara lain, termasuk AS. Tidak satu pun negara di dunia dapat digolongkan sebagai rekan atau teman dari Cina.

Politik luar negeri Indonesia, bebas-aktif, mendorong fleksibilitas pergerakannya di dalam pergaulan internasional. Namun, hal ini menyebabkan tidak teridentifikasinya kawan atau lawan. Dalam prinsip hubungan antarnegara, semua negara merupakan teman dan tidak ada musuh

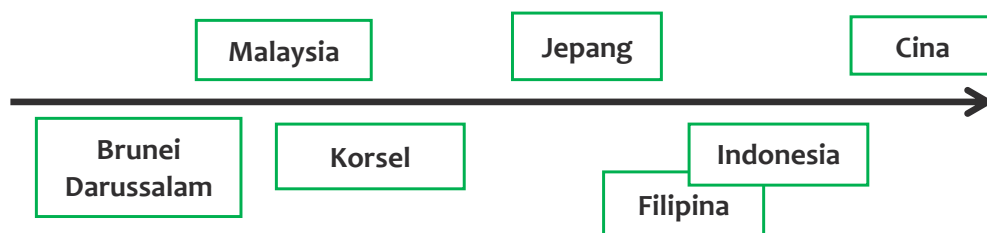
untuk Indonesia (*million friends, zero enemy*). Namun, Indonesia tidak dapat menyangkal bahwa kepentingan negara lebih penting, sehingga terjadi peristiwa penangkapan nelayan Cina di ZEE dan pemberian hukuman mati untuk warga asing yang mengedarkan narkoba.

### Posisi Strategis Indonesia dalam Pengamanan Wilayah Perairan

Posisi strategis Indonesia dalam interaksi antarnegara di berbagai bidang tidak dapat ditentukan melalui konstruksi sosialnya. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari pemetaan kepentingan nasional negara-negara lain dan Indonesia. Pemetaan ini dapat dilakukan di beberapa bidang.

Pengamanan wilayah perairan atau maritim berkaitan erat dengan dua bidang, yaitu politik dan ekonomi. Pemetaan kepentingan dari dua bidang ini dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam mengamankan wilayah maritimnya, khususnya yang berhadapan langsung dengan wilayah sengketa. Pemetaan kepentingan politik dan ekonomi negara-negara yang bersengketa dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.

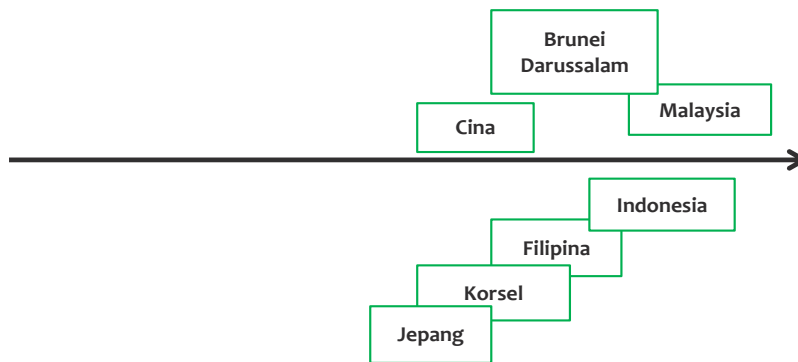
**Gambar 2.** Pemetaan Kepentingan Politik di Bidang Maritim



Sumber: Diolah oleh penulis



**Gambar 3.** Kepentingan Ekonomi di Bidang Maritim



Sumber: Diolah oleh penulis

Pada Gambar 2, kepentingan politik Cina lebih tinggi dari negara manapun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya strategi *String of Pearl*<sup>49</sup> dan kebijakan *nine dashed-line*. Kebijakan ini yang memperburuk sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan Laut Kuning. Sementara itu, Indonesia dan Filipina mempunyai kepentingan yang sama. Wilayah perairan ini penting untuk dua negara kepulauan di Asia Tenggara ini. Kepemilikan kedua negara di wilayah ini dapat meningkatkan pengaruh politisnya di tataran dunia karena wilayah ini merupakan jalur perdagangan internasional dan mempunyai kandungan minyak bumi dalam jumlah yang besar. Secara letak geografis, kepentingan Indonesia lebih besar daripada Filipina karena kapal dagang yang akan memasuki Laut Cina Selatan pasti melintasi perairan Indonesia.

<sup>49</sup> Strategi *String of Pearl* merupakan sebutan yang diberikan oleh pengamat hubungan internasional terhadap kebijakan luar negeri Cina di bidang kemaritiman. Kata 'pearl' dalam istilah strategi ini merujuk pada daerah-daerah yang dilewati jalur laut dari daratan utama Cina menuju pesisir Laut Arab dan Teluk Persia. Lihat, Christopher J. Pehrson, *String of Pearls: Meeting the Challenge of China's Rising Power Across the Asian Littoral*, (Carlisle: Strategic Studies Institute, 2006, hlm. 3.)

Jepang juga memerlukan keamanan wilayah perairan untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai wilayah kepulauan. Perairan Jepang juga menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Namun, kekayaan laut Jepang tidak sebesar perairan Indonesia dan Laut Cina Selatan. Hal ini yang menyebabkan kepentingan politis Jepang di bidang maritim masih lebih rendah dibandingkan Indonesia dan Filipina.

Brunei Darussalam berada di urutan terakhir. Kepentingan politis Brunei dapat dilihat dari sikap pemerintahnya dalam menghadapi sengketa di Laut Cina Selatan. Walaupun Brunei Darussalam digolongkan sebagai *claimant states*, pemerintahnya tidak pernah berdebat atau bertikai langsung dengan Cina, seperti yang dilakukan oleh Filipina dan Malaysia. Kepentingan ekonomi semua negara di wilayah perairan cenderung tinggi. Namun, untuk Jepang dan Korsel, kepentingan ekonomi tersebut lebih pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan nilai ekspor-impor yang perdagangannya dilakukan melalui jalur perairan. Dengan kata lain, Jepang dan Korsel tidak

mempunyai kepentingan ekonomi yang besar terhadap sumber daya kelautan.

Berdasarkan pemetaan ini, Indonesia mempunyai kepentingan politik dan ekonomi yang besar dalam pengamanan wilayah perairan. Untuk memenuhi kepentingannya, pemerintah Indonesia dapat menggunakan kepentingan negara lain yang berada dalam pemetaan tersebut sebagai strategi pengamanan wilayah perairan. Setidaknya ada dua strategi yang dapat dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

**Pertama,** Indonesia dapat memfokuskan kerja sama pengamanan wilayah perairan dengan alasan kepentingan ekonomi. Pemerintah Indonesia perlu menekankan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur adalah untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga stabilitas perekonomian kawasan dan global. **Kedua,** melalui forum ASEAN+3, Indonesia dapat mendorong interdependensi negara-negara di Asia Timur. Interdependensi merupakan salah satu cara untuk mengubah konflik menjadi kerja sama. Hal yang menjadi kendala utama saat ini adalah pelaksanaan Komunitas ASEAN sejak tahun 2015 belum menunjukkan kemajuan yang signifikan di antara negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia.

## Kesimpulan

Negara-negara di Asia Timur dapat bekerja sama dalam tiga bidang, yaitu penjagaan

stabilitas ekonomi, penanganan isu perompakan, pemberantasan terorisme, dan penyelesaian masalah penyelundupan. Berdasarkan uraian di atas, Indonesia mempunyai posisi strategis dalam interaksi antarnegara pada tataran regional dan global. Sementara itu, negara-negara lainnya, terutama yang terlibat dalam sengketa wilayah perairan membutuhkan stabilitas kawasan untuk menjamin pemenuhan kepentingannya. Untuk memenuhi kepentingannya, Indonesia dapat mengambil peranan strategis dengan berfokus pada kepentingan bersama, terutama kepentingan ekonomi, dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa di perairan Asia Timur.

## Daftar Pustaka

### Buku

Buzan, Barry dan Ole Waever. 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ministry of Defence of Brunei Darussalam. 2004. *Brunei Darussalam Defence White Paper 2004*, Bandar Seri Begawan: Ministry of Defence of Brunei Darussalam.

Ministry of Defence of Malaysia, *Malaysia's National Defence Policy*. Kuala Lumpur: Ministry of Defence of Malaysia, n.d.

Sekretariat ASEAN. 2015. *ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-21*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

### Jurnal

Fan, Gaoyue. 2011. "Maritime Interests: China—US Cooperation and Conflicts". *Issues and Insight*. Vol. 11. No. 10.

Graham, Euan. 2015. "Divining the Fluid Element: From Cooperation to Conflict in Japan-China Maritime Relations". *Security Challenges*. Vol. 11.No.1.

Hong, Seoung-Yong. "Marine Policy in the Republic of Korea". *Marine Policy*. Vol. 9. No.2. 1995.

Jakobson, Linda. 2014. "China's Unpredictable Maritime Security Actors". *Lowy Institute for International Policy Report*. Desember.

Liu, J.Y. 2013. "Status of Marine Biodiversity of the China Seas. *PloS One*. Vol. 8. No.1.

Merced, Louie Dane C. 2014. "The Potentials and Limits of Philippines—South Korea Maritime Defense Cooperation". *FSI INSIGHT*. Vol. 1, No. 4. September.

Othman, Mohamad Rosni. 2012. "A New Management Structure for Malaysian Economic Exclusive Zone". *The International Journal of Social Sciences*. Vol. 4. No.1. 30 November.

Pehrson, Christopher J. 2006. *String of Pearls: Meeting the Challenge of China's Rising*

*Power Across the Asian Littoral*. Carlisle: Strategic Studies Institute.

Ramadhani, Masyithoh Annisa. 2015. "An Indonesian Perspective toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest while Maintaining Neutrality in the South China Sea Possible?" *European Scientific Journal*. November.

Storey, Ian. 2013. "Japan's Maritime Security Interests in Southeast Asia and the South China Sea Dispute." *Political Science*. Vol. 65. No. 2.

### Makalah

Campbell, Caitlin et al. 2013. "China's 'Core Interests' and the East China Sea" *U.S.-China Economic and Security Review Commission*. 10 Mei.

De Castro, Renato Cruz, "International Dimensions of National (In) Security Concepts, Challenges and Ways Forward," disampaikan dalam 9<sup>th</sup> *Berlin Conference on Asian Security (BCAS)* yang dilaksanakan di Berlin pada tanggal 14—16 Juni 2015.

Gindarsah, Iis dan Adhi Priamarizki. "Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns". *RSIS Policy Report*.

Kardon, Isaac B, "China's Maritime Rights and Interests: Organizing to Become a Maritime Power" disampaikan dalam *The China as a "Maritime Power" Conference*, Arlington pada 28—29 Juli 2015.

Yoon, Sukjoon. 2015. "Korea-China Maritime Boundary Talks: Implications for South China Sea," *RSIS Commentary*. Nomor 089—13 April.

### Websites

Dodgson, Lindsay, "Resources and Tension in the South China Sea" dalam <http://www.offshore-technology.com/features/featureresources-and-tensions-in-the-south-china-sea-4707224/>, 2 Mei 2016, diakses pada 7 Februari 2017.

Dahlan, Firdaus, "Indian Ocean Rim Association (IORA) Peran Indonesia Memperkuat Kerja Sama di Kawasan Samudera Hindia," dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/teras-diplomasi/1833-indian-ocean-rim-association-ioraperan-indonesia-memperkuat-kerjasama-di-kawasan-samudera-india.html>, 26 Maret 2015, diakses pada 7 Februari 2017.

Husna, Rida, 13 Januari 2017, "China Trade Surplus Narrow to 8-Month Low in December," dalam <http://www.tradingeconomics.com/china/balance-of-trade>, diakses pada 7 Februari 2017.

<http://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/>, diakses pada 7 Februari 2017.

"Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, 13 November 2014, diakses pada 31 Januari 2017.

"IORA Background," dalam <http://www.iora.net/about-us/background.aspx>, diakses pada 1 Februari 2017.

Republika Ng Pilipinas. 2011. *National Security Policy 2011—2016: Security the Gains of Democracy*. Manila: Republika Ng Pilipinas.

Santos, Matikas, 12 Juli 2016, "Philippines Wins Arbitration Case vs. China over South China Sea," dalam <https://globalnation.inquirer.net/140358/philippines-arbitration-decision-maritime-dispute-south-china-sea-arbitral-tribunal-unclos-itlos>, diakses pada 7 Februari 2017.

"What's China's 'nine-dash line' and why has it created so much tension in the South China Sea?," dalam <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1988596/whats-chinas-nine-dash-line-and-why-has-it-created-so>, 17 Oktober 2016, diakses pada 7 Februari 2017.